

PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA SETELAH MERDEKA

Yuliani

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Indonesia
(Mahasiswa Pascasarjana, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas)
Corresponding author email: yuliani_yul@yahoo.co.id

Edy Purwanto

Inspektorat Daerah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Indonesia
(Mahasiswa Pascasarjana, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas)
edypurwanto918@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses Islamic education in Indonesia after independence. This study discusses using the literature review method. And the process of the stages of work include: First, literature review method which is the process of collecting data sources for Islamic educational studies after independence, as for the content of this research about the development of Islamic education after independence where the pesantren education system and madrasah in order to produce skilled workers who are ready to enter the world of work. Islamic boarding schools (pondok pesantren) have great potential to create new entrepreneurs and grow the small and medium industry (IKM) sector. For this reason, the government is intensively implementing the Santripreneur program as an effort to optimize the provision of employment in the region or village while reducing the unemployment rate and encouraging equitable distribution of community welfare.

Keywords: Curriculum, System, Islamic Boarding School, Madrasah, Skilled Workforce.

ABSTRAK

Artikel ini membahas Pendidikan Islam di Indonesia setelah kemerdekaan. Pada Penulisan artikel ini penulis menggunakan metode tinjauan pustaka. Dan proses tahapan kerjanya meliputi: Pertama, melakukan proses pengumpulan sumber-sumber data untuk bahan kajian mengenai Pendidikan Islam setelah kemerdekaan, adapun isi dari penelitian ini tentang perkembangan Pendidikan Islam setelah kemerdekaan dimana sistem pendidikan pesantren dan madrasah ternyata bisa menghasilkan tenaga kerja yang trampil yang siap terjun di dunia kerja. Pondok pesantren berpotensi besar menciptakan wirausaha baru dan menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah (IKM). Untuk itu, pemerintah gencar melaksanakan program Santripreneur sebagai salah satu upaya pengoptimalan dalam penyediaan lapangan kerja di daerah atau desa sekaligus mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Kurikulum, Sistem, Pesantren, Madrasah, Tenaga Kerja Trampil.

PEDAHULUAN

Sejarah masuknya Islam di Indonesia (nusantara) terjadi melalui berbagai macam cara, di antaranya melalui perdagangan, perkawinan yang dimotori oleh para saudagar-saudagar Arab, pendidikan (pesantren), madrasah, tasawuf, dakwah, kesenian dan budaya. Kehadiran mereka menarik minat kalangan putra-putri di kawasan Nusantara ini untuk mempelajari dan mendalami ajaran Islam secara mendalam hingga banyak di antara mereka yang menjadi ulama besar dan aktif mendakwahkan ajaran agama Islam di seluruh kawasan Nusantara bahkan ke negeri-negeri tetangga. Dari perjuangan panjang itulah maka sampai sekarang Islam tumbuh dan berkembang di Indonesia. Perjuangan para muballigh (penyebarkan agama) Islam tersebut tidak hanya sebatas mendakwahkan agama, akan tetapi mereka juga melakukan perjuangan melawan penjajah dengan nyawa sebagai taruhannya. Dengan demikian sejarah telah membuktikan peranan dan andil yang sangat besar para tokoh Islam dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Secara historis asal-usul pesantren baik kurikulum maupun sistemnya banyak menjadi bahan perdebatan. Namun demikian, tampaknya disepakati bahwa pesantren pernah menjadi sistem pendidikan utama di wilayah nusantara jauh sebelum kemerdekaan, bahkan jauh sebelum masa penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa di wilayah nusantara. Pada waktu itu, sistem pesantren ini terdapat diseluruh pelosok nusantara walalupun dengan nama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dapat dimengerti ketika *Fort Van der Capellen* (1819 M) dalam rangka mewujudkan gagasan diselenggarakannya pendidikan bagi penduduk pribumi menaruh perhatian pada pesantren sebagai lembaga pendidikan lokal. Penyebarannya yang luas dan tradisi penyelenggaraannya yang dibiayai secara mandiri oleh masyarakatnya sendiri menyebabkan pesantren dianggap memiliki basis rakyat sehingga sesuai dengan tujuan pengadaan pendidikan pribumi (Hanipudin, 2019).

Disamping itu, usulan untuk memilih pesantren ialah karena pendidikan ini dibiayai sendiri oleh rakyat sehingga tidak akan banyak menggunakan keuangan negara. Namun demikian, ketika itu telah ada sistem sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu sistem pendidikan yang sengaja didirikan untuk pengajaran dan penyebaran agama Protestan. Sekolah ini pertama kali telah berdiri 33 buah sekolah sejenis. Apa yang diterapkan sekolah-sekolah missionaris tersebut sesuai dengan sistem persekolahan yang telah berkembang di dunia Barat kala itu, tetapi dengan menitik beratkan pada muatan pendidikan agama (Kristen) (Hasan, 2012).

Keberadaan sekolah ini ternyata pada gilirannya menjadi pesaing bagi sistem pesantren ataupun masjid ketika pemerintah kolonial berusaha menentukan titik-tolak bagi sistem pendidikan untuk bumi putera. Pilihan itu kemudian justru jatuh pada sistem sekolah seperti yang dikembangkan sekolah-sekolah missionaris. Beberapa sumber menyebutkan bahwa disahkannya sistem pendidikan Islam lokal sebagai alternatif adalah karena dianggap jelek, baik dari segi kelembagaan, kurikulum maupun metode pembelajarannya. Adalah *Van der Chijs* yang mengambil sistem persekolahan missionaris untuk basis pendidikan sekolah desa itu dengan mulai mengurangi pelajaran agamanya dan menambahkan pelajaran umum. Sehingga sekolah desa itu terbebas dari pelajaran agama dan menjadi sekuler. Memang ada perbedaan tujuan antara

pendidikan di mesjid, pesantren ataupun sekolah missionaris, dengan sekolah yang diselenggarakan pemerintah kolonial. Bagi yang terakhir ini, pendidikan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja (Hanipudi, 2019).

Padahal pendidikan dalam kelompok pertama adalah untuk menyiapkan guru atau ahli agama yang berakhlak. Dilihat dari sisi itu, maka dapat dimengerti jika pemerintah kolonial waktu itu lebih tertarik pada sistem sekolah missionaris. Jika ditarik maju, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan juga kurang lebih sama seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah kolonial. Sesudah kemerdekaan, pesantren tidak diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Salah satu indikatornya ijazah pesantren tidak berlaku untuk melamar pekerjaan. (Hasan, 2012).

Berdasarkan dari kajian awal di atas membahas tentang sejarah pendidikan islam di era Orde Lama dan setelah kemerdekaan di era Orde Baru Republik Indonesia dimana peran pesantren/ madrasah dalam Sistem Pendidikan membangun Bangsa Indonesia tetap berlandaskan Agama Islam agar menghasilkan tenaga kerja yang trampil sehingga tetap bisa berdaya saing dengan sekolah umum lainnya. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan lebih lanjut tentang sistem pendidikan dan kurikulum agar sistem pendidikan di dalam pesantren dan madrasah bisa menghasilkan tenaga kerja yang trampil yang bisa terjun langsung kemasyarakat dan dunia kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dan proses tahapan kerjanya meliputi merupakan proses pengumpulan sumber-sumber data untuk kajian pendidikan setelah kemerdekaan, adapun isi dari penelitian ini tentang perkembangan pendidikan islam setelah kemerdekaan dimana agar sistem pendidikan pesantren dan madrasah agar bisa menghasilkan tenaga kerja yang trampil yang siap terjun di dunia kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam Di Era Orde Lama

Pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualistis, yaitu sistem pendidikan dan pengajaran di sekolah umum yang sekuler tak mengenal agama warisan dari pemerintah Belanda yang hanya dinikmati kalangan atas saja dan sistem pendidikan dan pengajaran yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam sendiri dengan berbagai variasi pola pendidikannya yang berurat akar serta dinikmati kalangan bawah (Pulungan, 2018); (Hifza & Aslan, 2019); (Aslan, 2018); (Aslan & Hifza, 2019); (Suhardi dkk., 2020).

Fathurrahman Kafrawi (dalam Pulungan, 2018) ketika menjabat sebagai Menteri agama di masa Syahrir II berhasil memperjuangkan agar pendidikan agama diberikan di sekolah-sekolah umum negeri dari tingkat Sekolah Rakyat (sekarang SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun pada saat itu nilai pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-undang Pendidikan tahun 1950 Nomor 4 pada bab XII tentang Pelajaran Agama di sekolah-sekolah negeri, pasal 20 sebagai berikut: 1) Dalam sekolah-sekolah

negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. 2) Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

Pada akhir Orde Lama, yang ditandai dengan dibubarkannya PKI, peserta pertarungan ideologis menjadi berkurang. Bahkan menyusul setelah itu keluar TAP MPRS XXVII yang mewajibkan pendidikan agama di semua tingkat pendidikan. Lebih dari itu, dalam lampirannya diisyaratkan perlunya perhatian dan yang lebih wajar terhadap pendidikan Islam termasuk pesantren. Dengan demikian, secara teknis persaingan di bidang pendidikan ini relatif bertambah ringan. Tugas utama Departemen Agama seperti diungkap pada alinea sebelumnya adalah mengamankan program pendidikan secara umum sesuai yang digariskan pemerintah (Sismono, 1991).

Pendidikan Islam Di Era Orde Baru

Pada masa awal Orde Baru, pemerintah berhasil mengalihkan perhatian terhadap bidang pendidikan dari perdebatan konsep yang bersifat ideologis politis kepada orientasi praktis. Pendidikan waktu itu diletakkan sebagai bagian dari strategi kebudayaan, di mana pendidikan dijadikan alat membentuk manusia modern yang independen dari kekuasaan kerabat dan etniknya serta bersikap mencintai ilmu dan teknologi. Pendidikan dalam kerangka ini disetting untuk menghasilkan *man power* yang dapat menggerakkan dan menjamin laju industri yang menjadi program pemerintah. Dari sini, dapat dipahami keluarnya SKB tiga menteri tahun 1975.

SKB Tiga Menteri Tahun 1975 merupakan keputusan bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, nomor: 6 tahun 1975, Nomer: 037/U/1975, dan Nomor: 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah. SKB ini berhasil menjaga eksistensi pesantren/madrasah dengan memasukkannya ke dalam sistem pendidikan nasional, memberinya ruang mobilitas terhadap lulusan-lulusannya.

Namun di sisi lain, kebijakan pemerintah Orde Baru yang dituangkan dalam SKB Tiga Menteri tersebut banyak dipermasalahkan oleh sebagian besar umat Islam, terutama ulamanya. Karena SKB Tiga Menteri itu dianggap membuat siswa madrasah serba tanggung, tidak mengerti dengan baik pengetahuan agama dan juga umum, sehingga akan mengakibatkan kelangkaan ulama. Untuk mencari solusinya untuk Departemen Agama pada tahun 1987, dimasa Menteri Munawir Sjadzali, mendirikan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Madrasah ini diharapkan menjadi lembaga mencetak calon ulama yang mengerti agama dengan baik juga pengetahuan umum utamanya bahasa Arab dan Inggris. Namun sayangnya MAPK/MAK ini tidak mempunyai payung hukum, karena madrasah yang diakui berdasarkan SKB Tiga Menti itu adalah 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Bahkan madrasah ini juga belum jelas posisinya dalam undang-undang Sisdiknas Nomor 2 tahun 1989. MAPK/MAK termasuk di dalam pendidikan keagamaan, baru mendapatkan tempat dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. (Pulungan, 2018).

Pulungan (2018) menjelaskan setelah melewati perjalanan sejarah yang cukup panjang serta penuh dengan berbagai dinamika, akhirnya madrasah semakin mendapatkan tempat dan pengakuan dari pemerintah. Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 telah semakin mempertegas posisi dan kedudukan madrasah yang setara dengan sekolah umum lainnya. Oleh karenanya, masyarakat ataupun pemerintah tidak boleh lagi mendikhotomi antara sekolah umum dan sekolah agama (Islam), karena materi dan kebijakan-kebijakan yang biasanya melekat pada lembaga pendidikan umum seperti, UAN, UNBK dan penerapan K 13 berlaku bagi madrasah.

Tumbuh Berkembangnya Pesantren Dan Madrasah Di Indonesia

Mula-mula memang ada tanda pemihakan terhadap pendidikan Islam, berkat pembaharuan di dalamnya yang menyandingkan bersama antara ilmu-ilmu umum dan agama. Soekarno yang tergolong nasionalis tetapi sering digambarkan agamis yang pada kemudian hari ternyata menjadi presiden pertama menunjukkan reaksi positifnya terhadap gagasan untuk memasukan sebanyak mungkin ilmu-ilmu umum ke dalam madrasah. (Hassan, 2012).

Memilih sistem pendidikan Islam berarti memberikan pengakuan terhadap komunitas muslim dan secara psikologis meningkatkan martabatnya. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan akan memberikan dampak psikologis yang negatif terhadap komunitas sekuler yang selama ini terbina dengan sekolah kolonial, padahal mereka relatif lebih terdidik dan terampil untuk menjalankan roda pemerintahan dan pengisian kemerdekaan.

Berdirinya Departemen Agama sering digambarkan sebagai kompensasi bagi umat Islam untuk mengurangi kekecewaan menyusul kekalahanannya dalam pertempuran ideologis, termasuk termarginalkannya sistem pendidikan Islam (Azra, 2006).

Berkaitan dengan pendidikan Islam ini, tugas-tugas Departemen Agama meliputi; 1) Memberikan pengajaran agama disekolah negeri dan particular (khususnya); 2) Memberi pengetahuan umum di madrasah; 3) Mengadakan pendidikan guru agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).

Dalam perkembangannya, Departemen Agama mengurus semua lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik formal seperti madrasah hingga perguruan tinggi Islam maupun informal yang meliputi masjid, majlis ta'lim, pesantren, madrasah diniyah, TPA, TK, dan PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam). Jika dilihat dari latar belakang kelahirannya, keberadaan Departemen Agama (Kementerian Agama) berkaitan erat dengan pendidikan Islam ini, Departemen Agama memiliki dua tugas sekaligus. *Pertama*, menjalankan program pemerintah dibidang pendidikan. *Kedua*, menjadi representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam yang lebih luas di Indonesia. Dalam hal yang terakhir ini, terlihat pada perjuangannya menggolkan aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan disekolah-sekolah dan usahanya untuk meningkatkan secara kuantitatif dan mengembangkan secara kualitatif madrasah dan perguruan tinggi Islam dimana didalam perguruan tinggi islam dan di dalam pesantren para santri di ajarkan keahlian agar bisa menjadi tenaga kerja yang trampil.(Muhaimin, 2004).

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang masih sangat berpengaruh di Indonesia hingga saat ini. Hal itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu: *Pertama*, dunia pesantren

mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan ulama dari masa ke masa, tidak terbatas dari periode tertentu dalam sejarah Islam. *Martin Van Bruinessen* (dalam Azra 2006). mengistilahkan bahwa pesantren adalah untuk mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu.

Kedua, Pesantren merupakan tempat untuk mendidik calon-calon pemimpin di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya kebutuhan akan pesantren tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam realitasnya banyak di antara pemuka masyarakat adalah lulusan pesantren.

Madrasah dalam *Shorter Encyclopedia of Islam* sebagaimana yang dikutip oleh Haidar adalah *"Name of an institution where the Islamic science are studied"* (nama dari suatu lembaga dimana ilmu ke-Islaman diajarkan). Meskipun dalam kenyataannya "madrasah" berarti "sekolah", di Indonesia istilah tersebut secara khusus mengacu kepada "sekolah (agama) Islam". Di Wilayah Nusantara sistem madrasah mulai berkembang pada dekade awal abad ke-20 pada mulanya memfokuskan diri nyaris secara eksklusif pada studi bahasa Arab dan studi Islam lainnya. Seperti Alquran, Hadis, fiqh, sejarah Islam dan mata pelajaran Islam lainnya. Secara berangsur, kemudian madrasah secara perlahan mengadopsi pelajaran matematika, geografi dan ilmu-ilmu umum lainnya yang dimasukkan kedalam kurikulumnya.

Melalui beberapa penjelasan terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang dikenal dalam Islam. Dengan bahasa yang agak ringkas madrasah dapat pula diartikan sebagai sekolah yang bercirikan Islam. Madrasah sesungguhnya bukanlah asli lembaga pendidikan Indonesia, tetapi madrasah berasal dari dunia Islam Timur Tengah. Di Nusantara, madrasah diperkenalkan oleh para ulama yang pernah menimba ilmu di Al-Azhar dan berbagai universitas lainnya di dunia Timur.

Ditinjau dari segi kurikulumnya madrasah dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu Madrasah Diniyah, Madrasah dan Madrasah Keagamaan. Madrasah Diniyah adalah suatu bentuk madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama (Diniyah). Madrasah ini dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan agama yang disediakan bagi siswa yang belajar di sekolah umum. Madrasah ini terbagi menjadi tiga yaitu: 1. Madrasah Diniyah Awaliyah untuk siswa-siswa Sekolah Dasar (4 Tahun); 2. Madrasah Diniyah Wustho untuk siswasiswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (3 tahun); 3. Madrasah Diniyah 'Ulya untuk siswasiswa Sekolah Lanjutan Atas (3 tahun). Madrasah jenis kedua adalah Madrasah, yaitu sekolah yang berciri khas agama Islam. Madrasah ini terdiri dari tingkatan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Programnya sama dengan sekolah, hanya saja diberikan bobot pendidikan agama yang lebih banyak dibanding dengan sekolah negeri. Madrasah jenis ketiga adalah Madrasah Keagamaan, yakni madrasah pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan. (Abdul Munir, 1994).

Peranan pesantren sebagai alat transformasi kultural akan tetap berfungsi dengan baik jika pesantren masih dilandasi oleh seperangkat nilai-nilai utama yang senantiasa berkembang di dalamnya. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut; (a) Cara memandang kehidupan sebagai peribadatan, baik meliputi ritus keagamaan murni maupun kegairahan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. (b) Kecintaan yang mendalam dan penghormatan terhadap

pengabdian kepada masyarakat. (c) Kesanggupan untuk memberikan pengorbanan bagi kepentingan masyarakat pendukungnya (Hasan, 1987).

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam matranya sebagai anggota keluarga, kelompok dan warga negara, manusia ikut ditentukan oleh interaksi dengan orang lain. Penciptaan kualitas perorangan tidak dapat lepas dari lingkungan sosial dan hal-hal dalam masyarakat yang mengatur, mempengaruhi menunjang serta membentuk pola hidupnya. Kualitas bermasyarakat merupakan ciri kualitas manusia yang penting. Sebaliknya, kualitas ini tidak pula dapat dibangun tanpa membangun kualitas perorangan. Membangun dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia pada hakekatnya adalah membangun masyarakat. Dalam suatu masyarakat yang sedang membangun tidak akan terjadi bahwa masyarakat semuanya menjadi berkualitas. Bisa saja hanya sebagian kelompok elitnya, tapi bisa juga sebagian besar. Sehingga pemberian peran kelompok harus seimbang namun lebih menitik beratkan pada yang kurang berkualitas. Saling memberi atau saling asih, asah dan asuh dalam suatu masyarakat sedang membangun adalah sangat penting artinya. Disinilah peran pimpinan baik formal maupun informal masyarakat termasuk para kyai dan ustadz, akan sangat membantu terciptanya usaha pengembangan dan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berarti terciptanya kualitas masyarakat.

Pada akhir dekade 1980-an, dunia pendidikan Islam memasuki era integrasi karena lahirnya UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yakni mencakup jalur sekolah dan luar sekolah, serta meliputi jenis pendidikan akademik, pendidikan profesional, pendidikan kejuruan dan pendidikan keagamaan. Dalam perkembangan selanjutnya setelah UU nomor 23 Tahun 2003 yang disahkan Presiden tanggal 8 Juli 2003 diakui kehadiran pendidikan Islam, disamping pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keterampilan khusus (pasal 15). Dalam Undang-Undang ini Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) Kejuruan sudah dimasukkan dalam jenis pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Dengan demikian secara legalitas dan yuridis, madrasah Indonesia telah diakui sebagai jenis pendidikan yang berciri khas keagamaan. (Suyuti Pulungan 2018, 321-322).

Tenaga Kerja Trampil Pondok Pasantren

Dewasa ini pondok pesantren mempunyai kecenderungan-kecenderungan baru dalam rangka renovasi terhadap sistem yang selama ini dipergunakan, diantaranya adalah mulai akrab dengan metodologi ilmiah modern, dan semakin berorientasi pada pendidikan dan fungsional. Juga diversifikasi atau keanekaragaman program dan kegiatan makin terbuka sehingga dapat membekali para santri dengan berbagai pengetahuan di luar mata pelajaran agama maupun keterampilan yang diperlukan di lapangan kerja.

Pondok pesantren berpotensi besar menciptakan wirausaha baru dan menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah (IKM). Untuk itu, pemerintah tengah gencar melaksanakan program Santripreneur sebagai salah satu upaya pengoptimalan dalam penyediaan lapangan kerja di daerah atau desa sekaligus mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Adapun Program yang dibuat pemerintah di bawah kementerian poerindustrian yaitu “Program bertujuan menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan santri

pondok pesantren. Oleh karenanya, kami terus memfasilitasi melalui pemberian alat dan mesin untuk bekal para santri belajar kemandirian sebelum terjun ke masyarakat," Pimpinan Ponpes Lirboyo, KH M Anwar Manshur, menerima baik akan program tenaga kerja trampil dan wirausaha di lingkungan Pondok Pesantren pada November 2007.

Seiring pelaksanaan program-program strategis itu, Kementerian Perindustrian menjalankan dua model untuk kegiatan Santripreneur. *Pertama*, Santri Berindustri, memfokuskan pada pengembangan unit industri yang telah ada dan sumber daya manusia di lingkungan pondok pesantren yang terdiri dari santri dan alumni santri. *Kedua*, Santri Berkreasi, memberikan kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan potensi kreatif para santri maupun alumni yang terpilih dari beberapa pondok pesantren untuk menjadi seorang profesional di bidang seni visual, animasi dan multimedia sesuai standar industri saat ini.

Pada saat itu Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM) Gati Wibawaningsih mengungkapkan, program *pilot project* Santripreneur yang telah berjalan, misalnya di Pondok Pesantren Sunan Drajat dalam pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan ikan dan pembuatan alas kaki. Selain itu, pembuatan lampu LED dan revitalisasi industri garam (sumber: Kememprin 2017). "Dalam kurun waktu tahun 2013-2015, Direktorat Jenderal IKM telah membina beberapa pondok pesantren dengan pelatihan tematik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unit industri yang ada di pondok pesantren," dan Berdasarkan data Kementerian Agama, pada tahun 2014, pondok pesantren yang ada di Indonesia sebanyak 27.290 lembaga dengan jumlah santri mencapai 3,65 juta orang. "Ini menjadi potensi bagi penumbuhan wirausaha baru dan sektor IKM di Tanah Air," (Kemenprin, 2017).

KESIMPULAN

Peran lembaga pendidikan pondok pesantren sangat besar bagi terwujudnya tujuan pendidikan di Indonesia antara lain mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Hal ini dapat dipahami karena proses pembinaan santri di dalam pondok pesantren berlangsung secara simultan selama 24 jam dari pagi sampai malam. Para santri tidak hanya diberikan pengetahuan tetapi sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pondok pesantren. Kemudian dengan disusunnya sistem kurikulum pendidikan dan fungsional di Pesantren dan madrasah agar para santri diharapkan memiliki ketrampilan pada masing-masing keahliannya dan menambah pengetahuan secara praktis tentang dunia kerja seperti program santripreneur, maka Pondok pesantren berpotensi besar menciptakan wirausaha baru dan menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah (IKM). Untuk itu, pemerintah tengah gencar melaksanakan program Santripreneur sebagai salah satu upaya pengoptimalan dalam penyediaan lapangan kerja di daerah atau desa sekaligus mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra. 2006. Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi Jakarta: Kompas.
- Abdul Munir Mulkhan, et.al 1994. Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren: Religiusitas Iptek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aslan. (2018). Dinamika Pendidikan Islam di Zaman Penjajahan Belanda. *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, 6(1), 39–50. <https://doi.org/10.21093/sy.v6i1.1024>
- Aslan & Hifza. (2019). Kurikulum Pendidikan Masa Penjajahan Jepang Di Sambas. *Edukasia Islamika*, 4(2), 171–188. <https://doi.org/10.28918/jei.v4i2.2295>
- Hifza & Aslan. (2019). Problematika Pendidikan Islam Melayu Patani Thailand. *Al-Ulum*, 19(2), 387–401. <https://doi.org/10.30603/au.v19i2.864>
- Suhardi, M., Mulyono, S., Syakhrani, H., Aslan, A., & Putra, P. (2020). Perubahan kurikulum lembaga pendidikan Islam di Sambas pada masa Kesultanan Sambas. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1).
- Basri, Hasan. 2012. Kapita Selekta Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
- Hanipudin, Sarno (2019). *Malan Journal of Islam and Muslim Society* vol 1 no 1 “Pendidikan Islam Indonesia dari Masa ke Masa” Stain Sufyan Tsuri Majenang.
- Karel A. Strennbrink. 1978. Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. Jakarta: LP3ES.
- Mahmud Yunus. 1995. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Muhaimin. 2004. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sismono. 1991. Sejarah dan Amal Bhakti Departemen Agama R.I. Bandung: Bina Siswa.
- Pulungan Suyuthi, 2018. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Prenadamedia Group.
- <https://www.kemenperin.go.id/artikel/18425/Tekan-Pengangguran,-Pondok-Pesantren-Dipacu-Ciptakan-Pelaku-IKM>.